

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA LANGSUNG DI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2010-2014**

Reni Apriani

Email : reni.apriani54@gmail.com

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

No. Telp: 0274 387649 (hotline), 0274 387656 ext. 199/200 No. Fax: 0274

387649

ABSTRACT

From 33 provinces and 471 regencies/cities in Indonesia, only about 10 percent have official territory boundary, one of them is West Nusa Tenggara province which has 10 regencies/cities. West Nusa Tenggara province has abundance sources of income and natural resources in each region. Therefore, this study aims to prove empirically the Local Own Revenue (PAD), and Equalization Funds towards Direct Shopping at regencies/cities in West Nusa Tenggara. The objects of this research are 10 regencies/cities in West Nusa Tenggara province. The data used in this research were taken from the data of 2010 to 2014.

The data analyzed in this research is secondary data from budgets revenue and expenditure-realization report documents of regencies/cities in West Nusa Tenggara province. The documents were obtained from local Government Finance Equalization Site on the internet (URwww.BPS.depkeu.go.id). Data of direct expenditure realization amount, local own revenue (PAD) and equalization funds were obtained from the documents. Sampling method used in this research is census method by taking the entire population. The researcher analyzed the data obtained by using panel data regression method with the Microsoft Excel 2007 and E-Views programs. The results of this research show that the Local Own Revenue (PAD) and the Equalization Fund have a positive and significant influence toward the direct expenditures. It means that local governments can predict the budget directly based on the Local Own Revenue (PAD) and Equalization Funds.

Key words: Local Own Revenue (PAD), Equalization Funds, Direct Expenditure.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBDnya yang semakin meningkat, diharapkan dimasa yang akan datang ketergantungan daerah terhadap transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maimunah, 2006).

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.

Dari rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB pada tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1.194,26 milyar, hanya terealisasi sebesar Rp. 1.098,87 milyar. Secara umum, persentase realisasi penerimaan terhadap anggaran penerimaan daerah Provinsi NTB tahun 2014 hanya mencapai 92,01 persen. Bila dilihat menurut kabupaten/ kota, Kabupaten Lombok Timur memiliki anggaran PAD terbesar, yaitu Rp. 205,52 milyar. Sedangkan yang terkecil adalah anggaran PAD Kota Bima, sebesar Rp. 24,72milyar.

Secara sektoral ekonomi NTB tahun 2011 dibanding tahun 2010 mengalami perkembangan pada sektor pertambangan, industri, listrik dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel & restoran, lembaga keuangan, dan sektor jasa, sedangkan sektor pertanian dan pengangkutan tumbuh cukup. Laju pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2011 sebesar 9,07% (tanpa pertambangan non migas) atau sebesar 14,89% (termasuk pertambangan non migas). Dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,69% (tanpa pertambangan non migas) atau 2,07% (dengan pertambangan non migas) berarti mengalami laju pertumbuhan cukup signifikan. BPS Provinsi NTB mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada semester I tahun 2014 mencapai 13,99%, berada di urutan kedua secara nasional setelah provinsi sulawesi barat. PDRB Provinsi NTB, pada triwulan II-2014 yang dihitung atas dasar harga (ADH) berlaku mencapai Rp. 12,11 triliun, sedangkan penghitungan ADH konstan mencapai Rp. 4,85 triliun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka akan dilakukan suatu penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung, Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)”.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di NTB.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja langsung.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap belanja langsung.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bratakusumah & Solihin (2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. Dalam kenyataannya PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situngkir dan Manurung (2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan

Pengertian dana perimbangan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 tentang Perimbangan antar Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Langsung

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 36 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aktiva tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap.

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Daerah penelitian yang digunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu :

- a. Lombok Barat
- b. Lombok Tengah
- c. Lombok Timur
- d. Lombok Utara
- e. Mataram
- f. Bima
- g. Dompu
- h. Sumbawa
- i. Kota Bima
- j. Sumbawa Barat

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan data sekunder berupa data *time series* dan *cross section* dalam bentuk data tahunan selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB serta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini di kumpulkan oleh penulis dengan menggunakan metode *library research* atau kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan ilmiah, artikel, jurnal, majalah, laporan-laporan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan pencatatan secara langsung berupa data *time series* dan *cross series* dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Metode analisis regresi data panel dipilih penulis dalam menganalisis data pada penelitian ini. Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam meneliti Belanja Langsung yang ada di NTB.

1. Uji Hausman

Uji Spesifikasi Hausman membandingkan model *Fixed Effect* dan *Random* dibawah hipotesis nol yang berarti bahwa efek individual tidak berkorelasi dengan regresi dalam model (Hausman dalam Venia,2014).

Jika tes Hausman tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan ($p > 0,05$), itu mencerminkan bahwa efek *Random estimator* tidak aman bebas dari bias, dan karena itu lebih dianjurkan kepada estimasi *Fixed Effect* disukai daripada efek *estimator* tetap.

2. Uji F (Uji Wald)

Uji F menguji signifikansi estimasi *Fixed Effect*, yang digunakan untuk memilih antara OLS *pooled* tanpa variabel dummy atau *Fixed effect*. F statistic disini adalah sebagai uji chow. Dalam hal ini, uji F digunakan untuk menentukan model terbaik antara kedua dengan melihat jumlah residual kuadrat (RSS).

3. Uji Autokolerasi

Autokolerasi adalah kolerasi yang terjadi antara anggota bservasi yang diurutkan menurut waktu atau menurut ruang. Untuk menguji apakah hasil estimasi suatu model regresi tidak mengandung kolerasi serial diantara *disturbance terms*, maka salah satu cara adalah dengan uji Durbin Wastons yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut (Gujarati,2006) :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang diperoleh dilakukan pengolah data menggunakan metode *Genereted Least Square* (GLS) untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja langsung. Dari hasil pengolahan data panel dengan model *fixed effect with crossection weight* diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$IG = -5.362411 + 0.201550PAD + 0.993257DANAPERIMBANGAN + et$$

Pada tabel 5.5 dan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -5.362411. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variabel sistematis lain yang juga mempengaruhi Belanja Langsung di Provinsi NTB akan tetapi tidak masuk dalam model penelitian.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.201550 terhadap Belanja Langsung, yang artinya apabila ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah 1 persen, maka tingkat Belanja Langsung akan meningkat sebesar 0.201550 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Langsung.

Adanya hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Langsung, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martini dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten Buleleng Tahun 2006 - 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Ada pengaruh positif dan signifikan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal. (2) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal. (3) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. (4) Ada pengaruh positif dan signifikan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal.

Dengan pemahaman bahwa apabila Belanja Modal meningkat maka dapat dipastikan bahwa Dana Perimbangan juga akan meningkat karena Belanja Modal merupakan bagian dari Belanja Langsung.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung

Berdasarkan data yang sudah diolah, Dana Perimbangan menunjukkan tanda positif dan signifikan di tingkat kepercayaan 1 persen untuk provinsi di Nusa Tenggara Barat. Koefisien Dana Perimbangan mempunyai nilai sebesar 0.993257, yang berarti apabila ada peningkatan 1 persen dari Dana Perimbangan maka akan menaikkan Belanja Langsung sebesar 0.993257 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian yang menduga adanya pengaruh positif dan signifikan antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung.

Adanya hubungan positif antara Dana Perimbangan dengan Belanja Langsung, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizanda Pradita (2013), menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. PAD, dan DAU digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi Belanja Modal. Data penelitian selama 2007 – 2011 digunakan sebagai dasar analisis. Hasil pengujian didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hasil penelitian ini juga dapat ditemukan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal belum tentu juga akan semakin tinggi.

Dengan pemahaman bahwa apabila Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus meningkat maka dapat dipastikan bahwa Dana Perimbangan juga akan meningkat karena Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari Dana Perimbangan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran Belanja Langsung hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja langsung yang akan dibelanjakan.

Begitu pula dengan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Langsung hal ini dapat

diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Langsung juga akan semakin tinggi.

B. SARAN

Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.

Pemerintah Daerah harus lebih dapat mengefisienkan jumlah pegawai yang dimilikinya dengan cara lebih fokus pada kualitas pegawai daripada kuantitasnya dan pemanfaatan teknologi, dengan begitu diharapkan Pemerintah bisa lebih menekan anggaran belanja pegawai yang selama ini menjadi pengeluaran terbesar Pemerintah.

Penghapusan honor belanja pegawai yang melekat pada pos belanja langsung atau lebih spesifik pada belanja modal dapat lebih mengefisienkan pengeluaran belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Abdul Halim. (2003). *Analisis Investasi*. Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Adi, Priyo Hari, 2006. “*Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pebdapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*”. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Ajija, Shochrul R. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EViews*. Salemba Empat. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Keuangan Pemerintah Daerah, NTB dalam angka 2010-2014*. <http://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 08 desember 2015.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bratakusuma Deddy Supriady dan Solihin Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dedi Rosadi. 2012. *Ekonometrika & Analisis Runtun Waktu Terapan*. Yogyakarta : Andi
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Indraningrum, Try, 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, *Skripsi*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang.

Insukindro. 2001. *Ekonomi Uang dan Bank.: Teori dan Pengalaman Indonesia*. Yogyakarta : BPF-UGM

Maimunah, Mutiara. 2008. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 11 (1) : 37-51.

Mardiasmo (2002). ”*Akuntansi Sektor Publik*”. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Martini dkk. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006-2012”. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pradita RR. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur”. Universitas Negeri Surabaya.

Pratiwi (2007). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Pratomo AA. 2015. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Daerah Terhadap Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Semarang.

Putro, Nugroho Suratno, 2009. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro.

Setyawati, Anis dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran (Pendekatan Analisis Jalur)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 4, No. 2: 211-228.

Simanjuntak, Robert A. 2002. *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, dalam buku Sidik, Machfud (Eds). 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM – FEUI, MPKP – FEUI, Dirjen PKPD. Jakarta : Kompas

Situngkir, Anggiat dan John Sihar Manurung. 2009. *Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum dan Dana Khusus pada Belanja Modal di Kota dan Kabupaten Sumatera Utara*. *Kajian Akuntansi*, Vol 4, no 2: 93 – 103 ISSN 1907 – 1442.

- Subagyo. 2003. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga.
- Sumodiningrat, G., 2010. *Ekonometrika Pengantar*. BPFE. Yogyakarta.
- Suratno Putro, Nugroho (2009). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2006-2008)*”. Jurnal, Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Uma Sekaran, 2006, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Edisi 4, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.